

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang menggambarkan hasilnya merupakan informasi yang memegang peranan penting bagi pemangku kepentingan dan manajemen perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan dapat tercermin dari pencapaian laba perusahaan. Laba sering digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal dan internal, digunakan untuk mengambil keputusan terkait kompensasi, penghargaan, indikator kinerja utama, kinerja manajemen, dan sebagai dasar penentuan tarif pajak. Oleh karena itu, kualitas informasi laba menjadi pusat perhatian investor, kreditur, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak.

Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Indonesia menganut sistem *self assesment* untuk pemungutan pajak yaitu memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak.

Peran masyarakat dalam partisipasi terhadap pembangunan negara diharapkan dapat teralokasikan secara optimal. Hal ini dapat terealisasi apabila masyarakat sadar, berperan aktif, dan patuh dalam pembayaran pajak. Menurut (Meiliawati & Waluyo, 2013) menyatakan bahwa peran pajak akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya.

Penerimaan negara harus ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, peran dari pajak dapat memberikan sumbangan yang besar bagi negara. Kepatuhan wajib pajak sangat

diharapkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga target pajak yang diharapkan pemerintah akan tercapai. Namun fakta menunjukkan sejak tahun 2015-2020 realisasi penerimaan pajak terus meleset dari target, ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel I. 1: Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak (Trilyun Rp)
Tahun 2015-2020:**

No	Tahun	Penerimaan Pajak			Pertumbuhan	
		Target	Realisasi	Pencapaian	Target	Realisasi
1	2020	1.404,5	1.198,8	85,35%	-9,2%	-10,0%
2	2019	1.546,1	1.332,7	86,35%	1,8%	1,5%
3	2018	1.518,8	1.313,3	86,47%	13,0%	14,1%
4	2017	1.343,6	1.151,1	85,67%	4,6%	4,1%
5	2016	1.285,0	1.106,0	86,07%	3,1%	4,8%
6	2015	1.246,9	1.055,6	84,66%	8,7%	7,2%

Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp.1.198,8 triliun atau 85,35% dari target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.404,4 triliun. Periode pencapaian pajak tahun 2015-2020, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata 6,3%. Pada tahun 2020 kinerja pencapaian penerimaan pajak terkontraksi dampak dari perlambatan ekonomi dan pemberian insentif dampak Pandemic Covid 19. Penerimaan pajak tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai angka 86,20%, tetapi ini memberikan indikator dari penerimaan perpajakan cukup baik dan sehat ditengah tekanan ekonomi dengan adanya Pandemi Covid 19 ini.

Sebagai pendapatan utama negara, pajak menjadi beban tambahan bagi perusahaan karena dapat mengurangi nilai laba bersih perusahaan dan pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka perusahaan

berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meminimalisir beban pajak, dengan melakukan perencanaan pajak (Herawati & Ekawati, 2016).

Bisnis saat ini harus pandai mengelola keuangan, bukan hanya kualitas dan kuantitas manajemen produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini berimplikasi pada saat anda menghadapi persaingan yang ketat untuk bertahan di pasar global. Kondisi ini menyebabkan manajer berperilaku berbeda dalam penyajian dan pelaporan data kinerja yang dikenal dengan praktik manajemen kinerja. Perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk mengelabui stakeholder terkait data laba yang dilaporkan perusahaan, hingga upaya perusahaan melakukan manipulasi informasi melalui praktik manajemen efisiensi dengan keinginan manajemen untuk menekan dan meminimalisasi beban pajak, manajemen cenderung meminimalisasi pembayaran pajak. Setiap perusahaan Indonesia wajib mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam menyusun laporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermakna. Selain itu, perusahaan juga menyusun laporan laba rugi sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan aturan PSAK dan aturan perpajakan saat menyusun laporan laba rugi menghasilkan nilai laba yang berbeda.

Manajemen laba merupakan upaya direksi perusahaan untuk mengintervensi atau memanipulasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui hasil perusahaan (Sulistyanto, 2008). Praktik manajemen laba pada perusahaan adalah logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer untuk mempengaruhi pelaporan (Negara & Suputra, 2017) menyatakan bahwa konsep manajemen laba dapat dijelaskan melalui pendekatan teori keagenan, yaitu teori bahwa praktik manajemen kinerja adalah pemangku kepentingan (principal) dan kepentingan pihak pelaksana akibat adanya benturan kepentingan antara manajemen senior (agen), konflik ini muncul ketika masing-masing pihak berusaha mencapai kemakmuran yang diinginkan. (Aditama & Purwaningsih, 2014) Manajemen kinerja adalah upaya manajemen untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu. perusahaan yang bersangkutan (Sulistyanto, 2008), Kinerja

manajemen dapat diukur dengan menggunakan metode bagi hasil. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur manajemen kinerja dengan menggunakan metode bagi hasil, yang menunjukkan upaya manajemen kinerja untuk menghindari usaha yang menguntungkan. (Philips & SO, 2003) dalam (Aditama & Purwaningsih, 2014) menggunakan zero profit point untuk mengetahui petunjuk praktik manajemen kinerja.

Sementara itu, pengelolaan hasil dipengaruhi oleh perencanaan pajak dan beban pajak yang dihitung akibat selisih antara laba akuntansi dan laba pajak, yang mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam saldo akhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian keseimbangan antara manfaat dari dana masyarakat melalui rekonsiliasi pajak. Menurut (Negara & Suputra, 2017), semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin baik peluang yang dimiliki perusahaan untuk menerapkan manajemen laba, dan semakin tinggi nilai beban pajak yang dihitung maka profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba akan semakin baik.

UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau masyarakat kepada pemerintah, tidak dikompensasi secara langsung, yang digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan pemerintah. Perencanaan pajak adalah proses memanipulasi usaha dan transaksi wajib pajak agar kewajiban perpajakannya minimal namun masih dalam batas peraturan perpajakan (Erly Suandy, 2016). Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin, karena pajak merupakan bagian yang dapat dikurangkan dari laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Menurut (Erly Suandy, 2016), upaya menciptakan beban pajak sering disebut dalam eufemisme tersebut sebagai tax planning atau tax protection. Perencanaan pajak merupakan tindakan hukum dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Negara & Suputra, 2017). Menurut (Aditama & Purwaningsih, 2014), perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan skala pengurangan pajak yang dapat mengukur efektivitas pengelolaan pajak yang dilakukan dalam laporan keuangan (Wild et al.,

2010). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak.

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul karena adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiscal. Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan (Erly Suandy, 2016). Beban pajak tangguhan ini muncul karena dilakukannya koreksi fiskal, dimana terjadi koreksi negatif yaitu jumlah penghasilan berdasarkan standar akuntansi lebih besar dari jumlah penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan, serta jumlah beban berdasarkan standar akuntansi lebih kecil dari jumlah beban berdasarkan peraturan perpajakan (Sumomba & Hutomo, 2012) dalam penelitiannya untuk mengukur beban pajak tangguhan menggunakan rumus besaran beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Penelitian ini menggunakan rumus besaran beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*), karena adanya perbedaan antara laporan keuangan standar akuntansi dengan laporan keuangan perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba. (Anggraini, 2018), perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aset, hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode sebelumnya untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proposional.

Menurut (Fitriani et al., 2020), pajak yang dikeluarkan merupakan faktor biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi kena pajak perusahaan maka semakin rendah laba yang dihasilkan perusahaan, maka perlu adanya upaya untuk meminimalkan pajak disebut perencanaan pajak.

Angka-angka di atas berkaitan dengan pajak tangguhan, fakta bahwa utang pajak tangguhan cenderung meningkat, sehingga mempengaruhi laba bersih tahun berjalan. Menurut (Fitriani et al., 2020) beban pajak tangguhan menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba perusahaan karena beban pajak tangguhan dapat mengurangi margin laba perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak dan meningkatkan jumlah beban pajak tangguhan maka terdapat indikator manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan data di atas juga dapat dilihat bahwa manajemen laba yang dilakukan, hal ini dikarenakan margin laba perusahaan cenderung menurun dan tidak menunjukkan fluktuasi laba yang besar sehingga memungkinkan laba dalam perusahaan stabil. Menurut (Aditama & Purwaningsih, 2014), manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk menguntungkan dirinya sendiri, khususnya perusahaan yang bersangkutan.

Studi sebelumnya tentang hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba mendapatkan kesimpulan yang berbeda (Negara & Suputra, 2017), menunjukkan perencanaan pajak dan biaya Pajak tangguhan memiliki dampak positif terhadap manajemen laba. Penelitian oleh (Putra et al, 2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif secara simultan atau bersama-sama terhadap manajemen laba. Sementara itu, menurut (Endriati et al., 2017), perencanaan pajak tidak berdampak signifikan terhadap manajemen pendapatan. Penelitian mengenai topik ini juga telah dilakukan oleh (Aditama & Purwaningsih, 2014) menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berdampak positif terhadap manajemen laba. (Khotimah, 2014) diperoleh hasil yang beragam, yang menyatakan bahwa perencanaan pajak menurut tarif pajak aktual memiliki pengaruh yang lebih signifikan daripada perencanaan pajak menurut biaya pajak tangguhan dan biaya pajak.

Perbedaan hasil penelitian-penelitian tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba menjadi motivasi dan alasan penelitian ini. Selain itu penelitian ini memfokuskan sampel penelitian pada salah satu sektor kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan sector aneka industri. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, ASET PAJAK TANGGUHAN, DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”**.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian konteks diatas, identifikasi masalah dalam studi penelitian ini adalah:

1. Perencanaan pajak cenderung meningkat sementara manajemen laba menurun di beberapa bisnis selama 2017-2020.
2. Aset pajak penghasilah tangguhan cenderung meningkat sedangkan laba manajemen menurun pada beberapa perusahaan pada periode 2017-2020.
3. Beban pajak tangguhan cenderung meningkat sementara manajemen laba mengalami menurun di beberapa perusahaan selama 2017-2020.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
2. Penelitian ini menguji pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesian (BEI) periode 2017–2020.
3. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terikat. Variabel bebas terdiri dari perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan. Dan variabel terikatnya adalah manajemen laba.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen laba berpengaruh?

2. Apakah Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba berpengaruh?
3. Apakah Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen laba berpengaruh?
4. Apakah Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan penulis untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis serta menambah pengetahuan dan bukti empiris tentang manajemen laba dan faktor yang mempengaruhinya.
3. Bagi perusahaan
Perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan yang tersedia bagi pencapaian sasaran yang baik.
4. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori-teori yang sudah ada dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.